

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kajian Teori**

##### **2.1.1. Teori Pengelolaan Sampah Domestik**

###### **a. Pengertian Sampah Domestik**

Sampah domestik merupakan sisa kegiatan rumah tangga sehari-hari yang tidak lagi digunakan, baik dalam bentuk padat maupun cair, yang berasal dari aktivitas manusia di permukiman. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik yang bersifat berbahaya (KLHK, 2022).

Beberapa ahli memberikan definisi yang menekankan pada aspek sumber dan karakteristiknya. Menurut Adisasmita (2021), sampah domestik adalah hasil sampingan dari aktivitas manusia di rumah tangga yang jika tidak dikelola akan menimbulkan gangguan terhadap kesehatan dan estetika lingkungan. Suwerda (2020) menambahkan bahwa sampah domestik mencakup bahan organik maupun anorganik yang timbul dari kegiatan konsumsi, pemeliharaan rumah, serta kegiatan sosial keluarga. Sedangkan Sulistyorini (2023) menegaskan bahwa persoalan utama dari sampah domestik di Indonesia bukan hanya pada volume, tetapi juga pada perilaku masyarakat dalam memilah dan mengolahnya.

###### **b. Karakteristik Sampah Domestik**

Karakteristik sampah domestik dapat dibedakan menjadi organik dan anorganik. Sampah organik meliputi sisa makanan, dedaunan, dan bahan alami yang mudah terurai, sedangkan sampah anorganik seperti plastik, logam, dan kaca membutuhkan waktu panjang untuk terurai (Suwerda, 2020).

Menurut KLHK (2023), komposisi sampah domestik di Indonesia didominasi oleh sampah organik sebesar 57%, sedangkan sisanya berupa plastik, kertas, logam, dan residu. Ciri lain sampah domestik di wilayah pedesaan adalah volumenya yang relatif lebih kecil dibandingkan daerah perkotaan, namun tingkat pengelolaannya masih rendah karena keterbatasan sarana dan kesadaran masyarakat (Rahmawati & Hidayat, 2024).

c. Sistem dan Komponen Pengelolaan Sampah Domestik

Secara umum, sistem pengelolaan sampah domestik meliputi pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir (KLHK, 2022).

Pendekatan *Community-Based Waste Management* (CBWM) atau pengelolaan sampah berbasis masyarakat menjadi strategi penting di berbagai daerah di Indonesia. Menurut Mulyani et al. (2024), CBWM mendorong partisipasi warga sejak tahap pemilahan hingga pengolahan, sehingga efektivitas pengelolaan meningkat. Prinsip dasar CBWM adalah kolaborasi, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sampah di sumbernya.

Peran rumah tangga dalam sistem ini sangat sentral. Studi oleh Sari dan Wibowo (2023) menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pengelolaan sampah domestik sangat dipengaruhi oleh keterlibatan keluarga dalam memilah dan mendaur ulang sampah, serta adanya dukungan kelembagaan dari pemerintah desa atau kelurahan.

d. Tantangan Pengelolaan Sampah di Wilayah Pedesaan

Pengelolaan sampah domestik di wilayah pedesaan menghadapi berbagai kendala yang bersifat sosial, kelembagaan, dan infrastruktur. Dari sisi sosial, masyarakat masih menganggap sampah sebagai hal yang tidak penting dan menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan individu (Nugraha et al., 2021). Secara

kelembagaan, banyak desa belum memiliki unit pengelola sampah yang berfungsi secara optimal. Keterbatasan sarana prasarana seperti tempat pembuangan sementara (TPS) dan fasilitas pengangkutan juga menjadi hambatan utama.

Selain itu, tingkat literasi lingkungan masyarakat desa masih tergolong rendah. Berdasarkan penelitian Astuti dan Prasetyo (2023) di Jawa Barat, rendahnya literasi ini berdampak pada minimnya kesadaran memilah sampah, meskipun sebagian besar warga menyadari dampak negatif sampah terhadap kesehatan dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif yang mampu mengubah perilaku masyarakat secara bertahap melalui pembiasaan dan keteladanan.

e. Konsep Pengelolaan Sampah Berkelanjutan (*Sustainable Waste Management*)

Konsep pengelolaan sampah berkelanjutan menekankan integrasi antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tujuannya adalah mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat (UNEP, 2023).

Model ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG) Nomor 12, yaitu *Responsible Consumption and Production*, yang mendorong praktik konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Dalam konteks ini, pengelolaan sampah tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas teknis, tetapi juga sebagai sarana edukatif dan transformasi sosial menuju perilaku pro-lingkungan (UNDP, 2024).

Penerapan pengelolaan sampah berkelanjutan di pedesaan dapat dicapai melalui kombinasi prinsip *reduce, reuse, recycle, replace, replant* (5R), serta pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi (Yuliana & Hermawan, 2025). Dengan demikian, keberlanjutan

pengelolaan tidak hanya diukur dari aspek teknis, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk mandiri dan konsisten menjaga kebersihan lingkungannya.

### 2.1.2. Teori Prinsip 5R (*Reduce, Reuse, Recycle, Replace, Replant*)

#### a. Pengertian dan Filosofi 5R

Prinsip 5R (*Reduce, Reuse, Recycle, Replace, dan Replant*) merupakan pengembangan dari konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang berfokus pada pengurangan sampah di sumbernya. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2022), perluasan menjadi 5R dimaksudkan untuk memperkuat nilai edukatif dalam pengelolaan sampah, dengan menambahkan unsur *Replace* (mengganti bahan yang tidak ramah lingkungan) dan *Replant* (menanam kembali sebagai bentuk pemulihan ekologis).

Secara filosofis, konsep 5R menekankan perubahan paradigma dari end-of-pipe management (pengelolaan setelah sampah terbentuk) menuju *source reduction* (pencegahan sejak awal). Menurut Herawati (2021), pendekatan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga moral dan edukatif, karena mendorong setiap individu untuk memiliki tanggung jawab terhadap lingkungannya. Dalam konteks sosial, prinsip 5R juga mengandung nilai partisipatif dan gotong royong, yang sesuai dengan karakter masyarakat pedesaan Indonesia.

#### b. Makna dan Aplikasi Setiap Unsur 5R

##### 1) *Reduce* (Mengurangi)

*Reduce* berarti mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dengan mengubah pola konsumsi dan gaya hidup. Menurut Rahmawati dan Prabowo (2023), strategi *reduce* dapat dilakukan melalui kebiasaan membawa wadah sendiri, membeli produk tanpa kemasan berlebih, dan menghindari

barang sekali pakai. Prinsip ini sejalan dengan teori perilaku berencana (*Theory of Planned Behavior*), di mana perubahan niat konsumsi dapat menurunkan timbunan sampah secara signifikan.

2) *Reuse* (Menggunakan Kembali)

*Reuse* mengacu pada penggunaan kembali barang atau kemasan untuk fungsi yang sama atau berbeda agar umur pakai barang menjadi lebih panjang (KLHK, 2022). Contoh aplikatifnya di masyarakat desa antara lain pemanfaatan botol bekas sebagai wadah tanam, atau penggunaan kain bekas untuk keperluan rumah tangga. Studi Suryani (2024) menunjukkan bahwa praktik *reuse* efektif meningkatkan kesadaran lingkungan, karena memberikan pengalaman langsung tentang nilai guna ulang suatu benda.

3) *Recycle* (Mendaur Ulang)

*Recycle* adalah proses mengolah kembali bahan yang sudah tidak terpakai menjadi produk baru yang memiliki nilai guna dan ekonomi. Menurut Fauzi et al. (2025), kegiatan daur ulang tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga membuka peluang ekonomi kreatif, seperti pembuatan kerajinan dari plastik dan kompos dari sisa organik. Daur ulang pada tingkat rumah tangga terbukti efektif apabila disertai pelatihan dan fasilitasi alat sederhana (KLHK, 2023).

4) *Replace* (Mengganti)

*Replace* berarti mengganti bahan atau produk yang tidak ramah lingkungan dengan alternatif yang lebih berkelanjutan. Contohnya penggunaan tas kain menggantikan kantong plastik, atau penggunaan bahan alami dalam kegiatan rumah tangga. Menurut Putri dan Santosa (2022), kesadaran untuk mengganti bahan menjadi ramah lingkungan sangat

dipengaruhi oleh edukasi dan keteladanan sosial di lingkungan sekitar.

5) *Replant* (Menanam Kembali)

*Replant* merupakan aspek baru yang menekankan pemulihan ekosistem melalui kegiatan penghijauan, seperti penanaman pohon, pemanfaatan pekarangan, dan urban farming. Menurut Yuliana & Hermawan (2025), kegiatan *replant* mampu memperkuat hubungan emosional masyarakat dengan lingkungan, menumbuhkan rasa kepemilikan, dan memperbaiki kualitas udara serta keindahan desa. Unsur *replant* juga berfungsi sebagai kegiatan edukatif yang memperkuat kesadaran ekologis anak-anak dan keluarga.

c. Implementasi Prinsip 5R dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Implementasi prinsip 5R pada skala rumah tangga merupakan kunci keberhasilan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Menurut Sari dan Pramudito (2023), praktik 5R menjadi lebih efektif jika diiringi dengan pendekatan edukatif dan penyediaan sarana pendukung, seperti tempat pemilahan dan fasilitas bank sampah.

Beberapa Desa di Indonesia, penerapan 5R telah dilakukan melalui program Bank Sampah Desa, Edukasi Hijau Sekolah Dasar, dan Kampung Ramah Lingkungan (KLHK, 2022). Misalnya, penelitian Nuryanti dan Harsono (2024) menunjukkan bahwa integrasi kegiatan 5R dengan pendidikan nonformal, seperti kegiatan PKK dan karang taruna, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat hingga 68%.

Namun, keberhasilan implementasi masih menghadapi kendala seperti kurangnya dukungan kelembagaan desa, rendahnya literasi lingkungan, dan keterbatasan insentif ekonomi (Astuti & Prasetyo, 2023). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan

yang menekankan pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar sosialisasi satu arah.

d. Keterkaitan Prinsip 5R dengan Edukasi Lingkungan dan Perubahan Perilaku

Prinsip 5R tidak hanya berfungsi sebagai strategi teknis pengelolaan sampah, tetapi juga sebagai alat pendidikan lingkungan (*environmental education tool*). Menurut Setiawan (2021), penerapan 5R dapat menjadi sarana pembelajaran partisipatif (*participatory learning*) yang menumbuhkan kesadaran, sikap, dan perilaku pro-lingkungan secara alami.

Dalam konteks perilaku, prinsip 5R berkontribusi pada perubahan tiga ranah penting: kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (tindakan). Studi oleh Wijayanti et al. (2024) menunjukkan bahwa kegiatan 5R berbasis rumah tangga mampu meningkatkan kesadaran dan perilaku ramah lingkungan sebesar 70% setelah enam bulan penerapan.

Keterkaitan antara 5R dan edukasi lingkungan juga sejalan dengan model *Value–Belief–Norm (VBN Theory)* yang menjelaskan bahwa nilai dan keyakinan lingkungan seseorang akan memengaruhi norma pribadi, kemudian menuntun pada perilaku pro-lingkungan (Stern et al., dalam revisi oleh Zhang & Li, 2023). Artinya, melalui praktik 5R yang berulang, masyarakat tidak hanya melakukan tindakan ramah lingkungan karena instruksi, tetapi karena munculnya keyakinan dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan hidup.

### 2.1.3. Teori Edukasi Lingkungan

a. Pengertian dan Hakikat Edukasi Lingkungan

Edukasi lingkungan (*environmental education*) merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam mengelola

serta melindungi lingkungan hidup secara berkelanjutan. Menurut Soemarwoto (2021), pendidikan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga pembentukan pola pikir dan perilaku manusia terhadap lingkungan.

Tilaar (2022) mendefinisikan edukasi lingkungan sebagai upaya sistematis dalam membentuk kepribadian yang ekologis melalui pengalaman langsung, sehingga individu mampu berpikir kritis dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2023) menegaskan bahwa edukasi lingkungan mencakup tiga jalur pendidikan, yaitu:

- 1) Formal, melalui lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas;
- 2) Nonformal, melalui kegiatan masyarakat seperti penyuluhan, pelatihan, dan kelompok sadar lingkungan;
- 3) Informal, melalui interaksi sosial, keluarga, dan keteladanan sehari-hari.
- 4) Dalam konteks masyarakat pedesaan, jalur nonformal dan informal memiliki peranan yang dominan karena pendekatannya lebih kontekstual, berbasis pengalaman, dan melibatkan nilai-nilai sosial budaya lokal (Astuti & Hidayah, 2024).

b. Tujuan, Fungsi, dan Prinsip Edukasi Lingkungan

Tujuan utama edukasi lingkungan adalah menumbuhkan kesadaran ekologis (*ecological awareness*), membentuk sikap peduli lingkungan, serta menanamkan perilaku ramah lingkungan (Rahman & Dewi, 2021). Tujuan tersebut sejalan dengan Agenda SDG 12 (*Responsible Consumption and Production*) yang menekankan pentingnya edukasi untuk perubahan perilaku konsumsi yang berkelanjutan (UNDP, 2024).

Menurut UNESCO (2023), edukasi lingkungan memiliki tiga fungsi utama:

- 1) Fungsi kognitif, yaitu memberikan pengetahuan tentang isu dan masalah lingkungan.
- 2) Fungsi afektif, yaitu menumbuhkan kepedulian dan tanggung jawab sosial.
- 3) Fungsi konatif, yaitu mendorong tindakan nyata untuk menjaga lingkungan.

Adapun prinsip dasar edukasi lingkungan menurut OECD (2022) meliputi:

- 1) Partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses belajar dan aksi lingkungan.
- 2) Kontekstual, yaitu menyesuaikan materi dan metode dengan kondisi sosial-budaya setempat.
- 3) Aplikatif, yaitu mengaitkan teori dengan praktik lapangan.
- 4) Berkelanjutan, yaitu menjamin proses belajar yang berkesinambungan antar generasi.

c. Strategi dan Pendekatan Edukasi Lingkungan di Masyarakat Desa

Strategi pelaksanaan edukasi lingkungan di masyarakat desa memerlukan pendekatan yang bersifat partisipatif dan kontekstual. Menurut Handayani dan Yusuf (2023), efektivitas edukasi lingkungan meningkat apabila kegiatan dilakukan melalui metode *learning by doing*, yaitu belajar sambil melakukan, seperti pelatihan pengomposan, daur ulang plastik, dan penghijauan pekarangan.

Selain itu, pendekatan keteladanan sosial (*social modeling*) terbukti berpengaruh terhadap perubahan perilaku masyarakat. Bandura (dalam revisi oleh Lee & Wang, 2023) menjelaskan bahwa perilaku pro-lingkungan dapat terbentuk melalui proses observasi, imitasi, dan internalisasi terhadap perilaku orang lain

yang dianggap berpengaruh di lingkungannya. Dalam konteks pedesaan, peran tokoh masyarakat, guru, dan kader lingkungan menjadi kunci keberhasilan edukasi lingkungan.

Bentuk-bentuk implementasi edukasi lingkungan di masyarakat desa antara lain:

- 1) Penyuluhan dan pelatihan lingkungan melalui PKK, karang taruna, atau posyandu.
- 2) Program sekolah hijau atau desa hijau, yang melibatkan generasi muda sebagai agen perubahan.
- 3) Kegiatan gotong royong dan kerja bakti lingkungan, yang memperkuat nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial.

Menurut Kusnadi et al. (2024), keberhasilan program edukasi lingkungan desa sangat ditentukan oleh integrasi antara perencanaan partisipatif, dukungan pemerintah desa, dan pembiasaan perilaku sehari-hari.

d. Edukasi Lingkungan melalui Penerapan Prinsip 5R

Edukasi lingkungan yang terintegrasi dengan penerapan prinsip 5R merupakan bentuk pembelajaran ekologis yang aplikatif dan mudah diterapkan di tingkat rumah tangga maupun komunitas. KLHK (2022) menyatakan bahwa kegiatan 5R bukan hanya pengelolaan teknis sampah, tetapi juga sarana pembentukan kesadaran ekologis melalui pengalaman langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian oleh Wijayanti & Santoso (2024) menunjukkan bahwa penerapan 5R sebagai media edukasi lingkungan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa hingga 72% dalam kegiatan pengelolaan sampah. Pendekatan ini juga efektif menumbuhkan nilai tanggung jawab, kerja sama, dan kepedulian sosial terhadap lingkungan.

Secara konseptual, 5R dapat menjadi media transformasi perilaku karena prosesnya melibatkan tiga tahapan perubahan:

- 1) Pengetahuan (*knowing*) – masyarakat memahami manfaat dan cara 5R;
- 2) Sikap (*feeling*) – muncul kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan;
- 3) Tindakan (*doing*) – masyarakat membiasakan perilaku 5R dalam kehidupan sehari-hari.

Model ini sejalan dengan teori Value–Belief–Norm (VBN) dan Theory of Planned Behavior (TPB), di mana pembelajaran berbasis praktik seperti 5R dapat membentuk sikap dan niat yang konsisten terhadap perilaku pro-lingkungan (Ajzen, 1991; Zhang & Li, 2023).

#### **2.1.4. Teori Perilaku Pro-Lingkungan**

##### **a. Pengertian dan Karakteristik Perilaku Pro-Lingkungan**

Perilaku pro-lingkungan (*pro-environmental behavior* / *environmentally responsible behavior*) adalah tindakan individu maupun kelompok yang secara sadar bertujuan melestarikan lingkungan hidup dan mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap alam.

Menurut Gifford (2020), perilaku pro-lingkungan mencakup segala bentuk tindakan sukarela yang berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem, seperti penghematan energi, daur ulang, dan konservasi sumber daya. Soemarwoto (2021) menjelaskan bahwa perilaku ini merupakan refleksi dari kesadaran ekologis yang telah terinternalisasi dalam nilai dan norma kehidupan seseorang.

Sementara itu, Sulistyorini (2023) menegaskan bahwa perilaku pro-lingkungan bukan hanya hasil pengetahuan, tetapi juga proses pembiasaan dan keteladanan sosial di lingkungan sekitar. Dengan demikian, perilaku ini tidak sekadar berupa reaksi

sesaat terhadap isu lingkungan, melainkan pola tindakan yang konsisten dan berulang.

Ciri-ciri utama perilaku pro-lingkungan antara lain dilakukan secara sadar dan sukarela, bukan karena paksaan, berdampak positif terhadap lingkungan secara langsung atau tidak langsung, tumbuh dari nilai, sikap, dan norma pribadi, menjadi kebiasaan sosial yang berkelanjutan di lingkungan masyarakat (Yuliani & Harsono, 2024).

b. Bentuk dan Contoh Perilaku Pro-Lingkungan

Bentuk perilaku pro-lingkungan dapat dikategorikan dalam tiga ranah utama (Gifford & Nilsson, 2014; diperbarui oleh Jain et al., 2023):

- 1) Perilaku konservatif sumber daya seperti hemat listrik, air, dan bahan bakar.
- 2) Perilaku pengelolaan limbah meliputi pemilahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan ulang sampah.
- 3) Perilaku restoratif lingkungan mencakup kegiatan penghijauan, reboisasi, dan menjaga kebersihan lingkungan.

Dalam konteks masyarakat pedesaan, bentuk perilaku pro-lingkungan sering diwujudkan melalui kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan, pembuatan kompos, penggunaan pupuk organik, serta keterlibatan dalam program desa hijau atau bank sampah (Astuti & Prasetyo, 2023).

c. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pro-Lingkungan

Perilaku pro-lingkungan terbentuk melalui kombinasi faktor internal dan eksternal (Han et al., 2023):

1) Pengetahuan Ekologis (*Ecological Knowledge*)

Pengetahuan tentang dampak lingkungan memengaruhi sikap dan keputusan perilaku. Semakin tinggi pemahaman seseorang terhadap isu lingkungan, semakin

besar kemungkinannya untuk bertindak ramah lingkungan (Wijayanti & Santoso, 2024).

2) Nilai dan Norma Sosial

Nilai sosial budaya, seperti gotong royong dan kepedulian kolektif, menjadi dasar pembentukan perilaku pro-lingkungan di masyarakat pedesaan. Norma yang menekankan kebersamaan dalam menjaga kebersihan lingkungan mendorong kepatuhan sosial terhadap perilaku positif (Handayani & Yusuf, 2023).

3) Keteladanan dan Lingkungan Sosial

Teori pembelajaran sosial (Bandura, dalam revisi oleh Lee & Wang, 2023) menjelaskan bahwa perilaku seseorang banyak dipengaruhi oleh model atau panutan di sekitarnya. Dalam konteks desa, perilaku tokoh masyarakat, guru, atau kader lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap adopsi perilaku pro-lingkungan warga lainnya.

4) Dukungan Struktural dan Fasilitas

Fasilitas pendukung seperti tempat pemilahan sampah, bank sampah, dan kebijakan desa ramah lingkungan berperan sebagai enabler perilaku. Menurut Putri & Santosa (2022), perilaku pro-lingkungan sulit dipertahankan tanpa dukungan sistemik dari pemerintah dan lembaga masyarakat.

d. Teori-Teori Pembentuk Perilaku Pro-Lingkungan

Untuk memahami bagaimana perilaku pro-lingkungan terbentuk, beberapa teori psikologi lingkungan modern digunakan sebagai dasar konseptual:

1) Theory of Planned Behavior (TPB) – Ajzen (1991), diperkuat oleh studi mutakhir Chen & Tung (2023)

TPB menjelaskan bahwa niat seseorang untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku.

Dalam konteks pengelolaan sampah, jika masyarakat memiliki sikap positif terhadap praktik 5R, merasa didukung oleh lingkungan sosial, dan percaya mampu melakukannya, maka kemungkinan besar mereka akan menerapkan perilaku pro-lingkungan.

- 2) *Value–Belief–Norm Theory (VBN)* – Stern et al. (1999), diperkuat oleh Zhang & Li (2023)

Teori ini menekankan bahwa perilaku pro-lingkungan lahir dari sistem nilai seseorang yang memengaruhi kepercayaan (belief) terhadap pentingnya menjaga alam, lalu berkembang menjadi norma pribadi yang menuntun tindakan. Dalam masyarakat desa, nilai lokal seperti gotong royong dan keselarasan dengan alam memperkuat jalur nilai–keyakinan–norma ini.

- 3) *Social Learning Theory (SLT)* – Bandura, diperbarui oleh Wang et al. (2024)

Menurut teori ini, individu belajar dari hasil observasi perilaku orang lain. Edukasi lingkungan yang melibatkan keteladanan tokoh masyarakat atau kader lingkungan dapat mempercepat pembentukan perilaku pro-lingkungan.

- 4) Sintesis Ketiga Teori dalam Konteks Desa

Dalam konteks masyarakat pedesaan, ketiga teori tersebut saling melengkapi. TPB menjelaskan niat dan kontrol perilaku, VBN menjelaskan nilai dan norma internal, sedangkan SLT menjelaskan proses pembelajaran sosial. Kombinasi ketiganya membentuk kerangka teoretik yang menjelaskan bagaimana penerapan prinsip 5R melalui edukasi partisipatif dapat membangun perilaku pro-lingkungan yang konsisten.

e. Perilaku Pro-Lingkungan dalam Konteks Komunitas Desa

Masyarakat pedesaan memiliki karakter sosial yang khas, seperti nilai kebersamaan, solidaritas, dan ketergantungan pada sumber daya alam. Nilai-nilai tersebut berpotensi besar dalam menumbuhkan perilaku pro-lingkungan jika dikelola melalui pendekatan yang partisipatif dan kontekstual.

Penelitian oleh Yuliana & Hermawan (2025) menunjukkan bahwa penguatan perilaku pro-lingkungan di desa dapat dicapai melalui kegiatan gotong royong, pelatihan 5R, dan penghijauan pekarangan. Faktor keberhasilan utama adalah keterlibatan langsung warga serta dukungan tokoh lokal sebagai agen perubahan.

Selain itu, adanya peraturan desa tentang kebersihan, insentif untuk bank sampah, dan program Desa Berseri (Bersih, Sehat, dan Lestari) juga memperkuat aspek struktural perilaku pro-lingkungan. Menurut Astuti & Hidayah (2024), perilaku pro-lingkungan di desa lebih mudah berkembang jika dilandasi pada norma sosial yang diinternalisasi, bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan.

#### 2.1.5. Teori Pemberdayaan dan Pendekatan Partisipatif Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) merupakan proses peningkatan kapasitas individu dan kelompok agar mampu mengontrol sumber daya, mengambil keputusan, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan lingkungan dan sosial.

Menurut Suharto (2021), pemberdayaan masyarakat adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kekuatan, potensi, dan peran masyarakat melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan. Kartasmita (2020) menekankan bahwa pemberdayaan bukan sekadar pelimpahan tanggung jawab, tetapi

proses menciptakan kemandirian, di mana masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan.

Sementara Ife dan Tesoriero (2022) menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua dimensi penting, yaitu:

- 1) Dimensi personal, berupa peningkatan rasa percaya diri dan kemampuan individu; dan
- 2) Dimensi struktural, berupa perubahan sistem sosial agar masyarakat memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya.

Dalam konteks pengelolaan lingkungan, pemberdayaan bertujuan membangun kemampuan ekologis masyarakat (*ecological literacy*) agar warga mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan permasalahan lingkungan secara mandiri (Yuliani & Harsono, 2024).

b. Konsep Partisipasi dalam Pengelolaan Lingkungan

Partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan setiap program lingkungan, terutama di wilayah pedesaan. Arnstein (2021) dalam konsep *Ladder of Participation* mengklasifikasikan tingkat partisipasi dari yang paling rendah (manipulatif dan konsultatif) hingga tertinggi (kemitraan dan kendali warga).

Dalam konteks pengelolaan lingkungan di Indonesia, bentuk partisipasi dapat dilihat dalam empat tingkatan (Rahman & Dewi, 2022):

- 1) Partisipasi konsultatif, masyarakat dilibatkan sebagai penerima informasi atau peserta sosialisasi;
- 2) Partisipasi kolaboratif, masyarakat ikut bekerja sama dalam pelaksanaan program;
- 3) Partisipasi delegatif, sebagian kewenangan diberikan kepada kelompok masyarakat;

- 4) Partisipasi inisiatif warga, masyarakat secara mandiri merancang dan melaksanakan kegiatan lingkungan tanpa ketergantungan penuh pada pemerintah.

Program *Community-Based Waste Management* (CBWM) yang diterapkan di sejumlah daerah menunjukkan bahwa partisipasi aktif warga dalam pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah meningkatkan efektivitas serta keberlanjutan program lingkungan (Mulyani et al., 2024).

c. Prinsip-Prinsip Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif dalam pengelolaan lingkungan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan objek. Menurut Suharto (2021) dan Ife & Tesoriero (2022), terdapat beberapa prinsip utama dalam pendekatan partisipatif, yaitu:

- 1) Inklusivitas, semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, anak muda, dan kelompok rentan, memiliki kesempatan untuk terlibat.
- 2) Kontekstualitas, pendekatan harus menyesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan setempat.
- 3) Kepemilikan lokal (*local ownership*), masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan.
- 4) Kolaborasi, sinergi antara masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta.
- 5) Keberlanjutan (*sustainability*), kegiatan partisipatif harus menciptakan dampak jangka panjang yang mandiri.

Pendekatan ini relevan dengan pengembangan edukasi lingkungan berbasis 5R, karena mengintegrasikan aspek edukatif, sosial, dan struktural dalam proses pembelajaran serta aksi nyata masyarakat (Wijayanti & Santoso, 2024).

d. Implementasi Pendekatan Partisipatif di Masyarakat Desa

Implementasi pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di desa dapat diwujudkan melalui berbagai strategi berbasis komunitas. Menurut Astuti dan Prasetyo (2023), bentuk konkret dari pendekatan ini antara lain:

- 1) Pembentukan kelompok sadar lingkungan (KSL) yang berfungsi mengoordinasikan kegiatan kebersihan dan penghijauan;
- 2) Pengelolaan bank sampah desa sebagai wadah ekonomi sirkular dan edukasi 5R;
- 3) Penerapan program desa hijau atau eco-village melalui kolaborasi pemerintah, sekolah, dan lembaga masyarakat;
- 4) Kegiatan pelatihan dan sosialisasi partisipatif, seperti pelatihan pembuatan kompos, pengelolaan limbah rumah tangga, serta pemanfaatan sampah anorganik menjadi kerajinan.

Penelitian Yuliana & Hermawan (2025) menunjukkan bahwa penerapan pendekatan partisipatif mampu meningkatkan kesadaran dan keterlibatan warga hingga 80% dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis 5R. Keberhasilan ini disebabkan oleh adanya kombinasi antara pendekatan edukatif, keteladanan tokoh masyarakat, serta pemberian ruang bagi warga untuk merancang dan mengelola program secara mandiri.

Pendekatan partisipatif juga terbukti memperkuat hubungan sosial antarwarga melalui kegiatan gotong royong dan musyawarah lingkungan. Dengan demikian, pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi praktik sosial yang memperkuat kohesi dan kemandirian komunitas (Sari & Pramudito, 2023).

e. Hubungan antara Pemberdayaan, Partisipasi, dan Perubahan Perilaku

Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat memiliki hubungan langsung dengan perubahan perilaku pro-lingkungan. Berdasarkan kerangka *Social Learning Theory* (Bandura, dalam revisi oleh Wang et al., 2024), keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan lingkungan berperan sebagai media pembelajaran sosial yang menumbuhkan sikap, nilai, dan kebiasaan baru.

Selain itu, teori *Value–Belief–Norm (VBN)* dan *Theory of Planned Behavior* (TPB) juga menegaskan bahwa perilaku individu dapat berubah apabila didukung oleh norma sosial, pengalaman belajar, dan rasa memiliki terhadap program lingkungan (Zhang & Li, 2023; Chen & Tung, 2023).

#### **2.1.6. Pelatihan Pengelolaan Sampah Berbasis 5R sebagai Bentuk Pemberdayaan Masyarakat**

a. Pengertian Pelatihan Lingkungan Berbasis Masyarakat

Pelatihan lingkungan berbasis masyarakat merupakan proses pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat dalam mengelola permasalahan lingkungan secara mandiri dan berkelanjutan. Pelatihan tidak hanya dimaknai sebagai penyampaian informasi, tetapi sebagai proses pembelajaran sosial yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memahami dan memecahkan permasalahan lingkungan di sekitarnya.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pelatihan dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kapasitas individu dan kelompok agar mampu mengidentifikasi masalah, mengambil keputusan serta melakukan tindakan nyata secara kolektif. Suharto (2021) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat menekankan pada peningkatan kapasitas dan

kemandirian masyarakat agar memiliki kontrol terhadap proses pembangunan, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup.

b. Pelatihan Pengelolaan Sampah Berbasis 5R sebagai Pendidikan Nonformal

Pelatihan pengelolaan sampah berbasis prinsip 5R (*Reduce, Reuse, Recycle, Replace, Replant*) merupakan bagian dari pendidikan nonformal yang bersifat aplikatif dan kontekstual. Pendidikan non formal melalui pelatihan memiliki peran penting dalam menjangkau masyarakat secara langsung terutama di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2022) menjelaskan bahwa pendidikan lingkungan melalui jalur non formal seperti pelatihan dan penyuluhan efektif dalam membentuk perilaku ramah lingkungan karena menekankan pada praktik langsung dan pembiasaan. Melalui pelatihan 5R, masyarakat tidak hanya memahami konsep pengelolaan sampah, tetapi juga dilatih untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memanfaatkan kembali barang yang masih layak pakai, mendaur ulang sampah, mengganti bahan tidak ramah lingkungan serta melakukan kegiatan penghijauan.

c. Pelatihan 5R sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pelatihan pengelolaan sampah berbasis 5R juga berfungsi sebagai strategi pemberdayaan masyarakat desa yang menekankan pada partisipasi aktif dan kemandirian warga. Ife dan Tesoriero (2022) menegaskan bahwa pemberdayaan yang efektif harus bersifat partisipatif dan kontekstual, yaitu menyesuaikan pendekatan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat serta melibatkan warga sebagai subjek utama kegiatan.

Dalam masyarakat pedesaan, pelatihan 5R memungkinkan warga untuk terlibat langsung dalam praktik pengelolaan sampah yang sesuai dengan potensi lokal seperti pemanfaatan pekarangan untuk kegiatan replant, pengolahan sampah organik menjadi kompos, dan penggunaan kembali barang rumah tangga. Mulyani et al. (2024) menyatakan bahwa pelatihan lingkungan yang dilakukan secara partisipatif mampu meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) masyarakat terhadap program pengelolaan sampah, sehingga mendorong keberlanjutan praktik tersebut.

Dengan demikian, pelatihan pengelolaan sampah berbasis prinsip 5R tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi lingkungan, tetapi juga sebagai proses pemberdayaan masyarakat yang membangun kapasitas, kesadaran, dan tanggung jawab kolektif dalam mewujudkan perilaku pro-lingkungan di tingkat desa.

#### **2.1.7. Prinsip Andragogi dalam Pelatihan Lingkungan Masyarakat Desa**

##### **a. Pengertian Andragogi dalam Pembelajaran Orang Dewasa**

Andragogi merupakan konsep pembelajaran yang secara khusus ditujukan bagi orang dewasa dengan menekankan pada peran aktif peserta dalam proses belajar serta relevansi materi dengan pengalaman hidup dan kebutuhan nyata mereka. Knowles (dalam Tilaar, 2022) menjelaskan bahwa andragogi memandang peserta didik dewasa sebagai individu yang telah memiliki pengalaman, nilai dan kerangka berpikir sendiri sehingga proses pembelajaran perlu bersifat dialogis, partisipatif dan berorientasi pada pemecahan masalah.

Berbeda dengan pedagogi yang berfokus pada pembelajaran anak-anak, andragogi menempatkan orang dewasa sebagai subjek pembelajaran yang mandiri. Dalam konteks masyarakat desa, pembelajaran orang dewasa tidak efektif apabila

hanya dilakukan melalui ceramah satu arah, melainkan perlu melibatkan pengalaman, praktik langsung serta diskusi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

b. Prinsip-Prinsip Andragogi dalam Pelatihan Lingkungan

Pembelajaran orang dewasa memiliki beberapa prinsip utama yang relevan untuk diterapkan dalam pelatihan lingkungan berbasis masyarakat. Menurut Tilaar (2022) dan Suharto (2021), prinsip-prinsip andragogi meliputi kebutuhan untuk mengetahui manfaat pembelajaran, kesiapan belajar yang dipengaruhi oleh peran sosial, serta orientasi belajar yang berpusat pada pemecahan masalah nyata.

Dalam pelatihan pengelolaan sampah berbasis 5R, prinsip andragogi tercermin melalui penyampaian materi yang langsung berkaitan dengan permasalahan sampah yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Masyarakat cenderung lebih menerima pembelajaran ketika mereka memahami manfaat langsung dari pelatihan seperti lingkungan yang lebih bersih, kesehatan keluarga yang lebih terjaga dan potensi nilai ekonomi dari pengelolaan sampah.

Selain itu, andragogi menekankan pentingnya pengalaman sebagai sumber belajar. Astuti dan Hidayah (2024) menyatakan bahwa pembelajaran lingkungan yang melibatkan pengalaman langsung seperti praktik pemilahan sampah atau pembuatan kompos lebih efektif dalam membentuk pemahaman dan kesadaran dibandingkan penyampaian materi secara teoritis semata.

c. Penerapan Prinsip Andragogi dalam Pelatihan Pengelolaan Sampah Berbasis 5R

Penerapan prinsip andragogi dalam pelatihan pengelolaan sampah berbasis 5R dilakukan melalui pendekatan *learning by doing*, yaitu belajar melalui praktik langsung. Dalam pelatihan ini, masyarakat tidak hanya diberikan penjelasan mengenai konsep 5R

*(Reduce, Reuse, Recycle, Replace, Replant)* tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pemilahan sampah, pemanfaatan kembali barang bekas, pengolahan sampah organik serta kegiatan penghijauan di lingkungan sekitar.

Handayani dan Yusuf (2023) menegaskan bahwa pelatihan lingkungan berbasis praktik dan partisipasi aktif mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat serta mempercepat proses internalisasi nilai-nilai pro-lingkungan. Melalui keterlibatan langsung, masyarakat desa dapat mengaitkan materi pelatihan dengan pengalaman dan kebiasaan yang telah mereka miliki, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah diterapkan.

Penerapan prinsip andragogi dalam pelatihan 5R memungkinkan masyarakat untuk belajar dari pengalaman mereka sendiri, saling berbagi pengetahuan antarwarga, serta membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dengan demikian, pelatihan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses pembelajaran sosial yang mendorong perubahan sikap dan perilaku secara bertahap.

#### **2.1.8. Karakteristik Pelatihan Pengelolaan Sampah Berbasis 5R di Wilayah Pedesaan**

##### **a. Pelatihan Lingkungan yang Kontekstual dengan Kondisi Sosial Pedesaan**

Pelatihan pengelolaan sampah berbasis prinsip 5R di wilayah pedesaan perlu dirancang secara kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya dan lingkungan masyarakat setempat. Masyarakat desa memiliki karakteristik sosial yang khas seperti ikatan sosial yang kuat, nilai gotong royong serta pola kehidupan yang dekat dengan lingkungan alam.

Oleh karena itu, pelatihan lingkungan yang diterapkan di wilayah pedesaan tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan pelatihan di wilayah perkotaan.

Ife dan Tesoriero (2022) menegaskan bahwa program pemberdayaan masyarakat yang efektif harus disesuaikan dengan konteks lokal agar dapat diterima dan dijalankan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Dalam konteks pelatihan pengelolaan sampah, pendekatan kontekstual memungkinkan masyarakat memahami materi pelatihan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan sebagai konsep yang bersifat abstrak.

b. Pelatihan Berbasis Praktik dan Pengalaman Langsung

Salah satu karakteristik utama pelatihan pengelolaan sampah berbasis 5R di masyarakat desa adalah penekanan pada praktik dan pengalaman langsung. Pelatihan yang menitikberatkan pada kegiatan praktik seperti pemilahan sampah, pembuatan kompos, pemanfaatan kembali barang bekas dan kegiatan penghijauan, dinilai lebih efektif dibandingkan penyampaian materi secara teoritis semata.

Astuti dan Prasetyo (2023) menyatakan bahwa pelatihan lingkungan berbasis praktik mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat secara signifikan karena peserta terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Melalui pengalaman langsung, masyarakat desa dapat melihat manfaat nyata dari penerapan prinsip 5R, sehingga mendorong munculnya motivasi untuk menerapkan praktik tersebut secara berkelanjutan di tingkat rumah tangga.

c. Pelatihan Partisipatif dan Berbasis Keterlibatan Masyarakat

Karakteristik penting lainnya adalah pelatihan yang bersifat partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Pelatihan partisipatif tidak hanya menempatkan

masyarakat sebagai peserta pasif tetapi sebagai subjek yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pelatihan.

Menurut Suharto (2021), partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci keberhasilan program pemberdayaan karena mampu meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif. Dalam pelatihan pengelolaan sampah berbasis 5R, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui diskusi kelompok, praktik bersama serta keterlibatan tokoh masyarakat sebagai fasilitator atau teladan dalam penerapan perilaku ramah lingkungan.

d. Pelatihan yang Bersifat Berkelanjutan dan Tidak Sekali Selesai

Pelatihan pengelolaan sampah berbasis 5R di wilayah pedesaan juga perlu dirancang sebagai proses yang berkelanjutan, bukan kegiatan yang bersifat sekali selesai. Perubahan perilaku masyarakat memerlukan waktu dan pengulangan, sehingga pelatihan perlu diikuti dengan pendampingan, penguatan dan evaluasi secara berkala.

Mulyani et al. (2024) menyebutkan bahwa banyak program pengelolaan sampah berbasis masyarakat tidak berlanjut karena pelatihan dilakukan secara sporadis tanpa pendampingan lanjutan. Oleh karena itu, pelatihan 5R yang berkelanjutan memungkinkan masyarakat untuk terus memperbaiki praktik pengelolaan sampah, berbagi pengalaman, serta mengatasi kendala yang muncul dalam penerapan di lapangan.

e. Pelatihan yang Mengintegrasikan Nilai Sosial dan Lingkungan

Karakteristik pelatihan yang sesuai dengan masyarakat desa juga ditandai dengan integrasi nilai-nilai sosial dan lingkungan yang hidup dalam masyarakat. Nilai gotong royong, kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan menjadi modal sosial yang dapat diperkuat melalui pelatihan pengelolaan sampah berbasis 5R.

Handayani dan Yusuf (2023) menyatakan bahwa pelatihan lingkungan yang mengaitkan materi dengan nilai sosial lokal cenderung lebih mudah diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat. Dalam konteks pedesaan, pelatihan yang dikaitkan dengan kegiatan bersama seperti kerja bakti dan musyawarah lingkungan, mampu memperkuat kesadaran kolektif serta mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

#### **2.1.9. Pelatihan Pengelolaan Sampah Berbasis 5R sebagai Mekanisme Perubahan Perilaku Pro-Lingkungan**

##### **a. Perubahan Perilaku sebagai Tujuan Edukasi Lingkungan**

Perubahan perilaku pro-lingkungan merupakan tujuan utama dari berbagai upaya edukasi lingkungan, termasuk pelatihan pengelolaan sampah berbasis prinsip 5R. Perilaku pro-lingkungan tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan dan melibatkan perubahan pada aspek pengetahuan, sikap serta tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pelatihan dipandang sebagai salah satu mekanisme strategis untuk memfasilitasi proses perubahan perilaku masyarakat.

Soemarwoto (2021) menyatakan bahwa perilaku manusia terhadap lingkungan merupakan hasil interaksi antara pengetahuan, nilai dan pengalaman hidup. Dalam konteks pengelolaan sampah domestik, pelatihan lingkungan berperan sebagai sarana untuk memperkenalkan pengetahuan baru, menumbuhkan kesadaran, serta mendorong masyarakat untuk mengadopsi perilaku yang lebih ramah lingkungan.

b. Pelatihan 5R dalam Proses Pembentukan Pengetahuan dan Sikap

Pelatihan pengelolaan sampah berbasis 5R berkontribusi pada pembentukan pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap lingkungan. Melalui pelatihan, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai dampak negatif sampah terhadap kesehatan dan lingkungan, serta manfaat penerapan prinsip 5R (*Reduce, Reuse, Recycle, Replace, Replant*) dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman ini menjadi dasar penting bagi perubahan sikap masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

Teori *Value-Belief-Norm* (VBN) menjelaskan bahwa perubahan perilaku pro-lingkungan diawali dari perubahan nilai dan keyakinan individu terhadap pentingnya menjaga lingkungan, yang kemudian berkembang menjadi norma pribadi yang memengaruhi tindakan (Zhang & Li, 2023). Dalam konteks pelatihan 5R, proses pembelajaran dan diskusi yang terjadi selama pelatihan memungkinkan masyarakat merefleksikan nilai dan keyakinan mereka, sehingga terbentuk sikap yang lebih peduli terhadap lingkungan.

c. Pelatihan 5R sebagai Pemicu Tindakan dan Pembiasaan Perilaku

Selain membentuk pengetahuan dan sikap, pelatihan pengelolaan sampah berbasis 5R juga berperan sebagai pemicu tindakan nyata dan pembiasaan perilaku pro-lingkungan. Pelatihan yang menekankan praktik langsung memungkinkan masyarakat untuk mencoba dan mempraktikkan perilaku ramah lingkungan, seperti memilah sampah, mengolah sampah organik, menggunakan kembali barang bekas, serta melakukan kegiatan penghijauan.

Teori pembelajaran sosial (*Social Learning Theory*) menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat terbentuk melalui proses observasi, imitasi, dan penguatan sosial (Bandura, dalam revisi oleh Lee & Wang, 2023). Dalam pelatihan 5R, keterlibatan

tokoh masyarakat dan fasilitator sebagai teladan memberikan contoh nyata perilaku pro-lingkungan yang dapat ditiru oleh warga lainnya. Proses ini mendorong terbentuknya pembiasaan perilaku yang dilakukan secara kolektif dalam komunitas desa.

d. Pelatihan 5R dan Niat Berperilaku Pro-Lingkungan

Pelatihan juga memengaruhi niat masyarakat untuk berperilaku pro-lingkungan. *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa niat berperilaku dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku (Ajzen, 1991; Chen & Tung, 2023). Melalui pelatihan 5R, masyarakat tidak hanya membentuk sikap positif terhadap pengelolaan sampah, tetapi juga merasakan dukungan sosial dari lingkungan sekitarnya serta meningkatkan keyakinan bahwa mereka mampu menerapkan prinsip 5R dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks masyarakat desa, dukungan sosial dan praktik bersama yang terbangun melalui pelatihan berperan penting dalam memperkuat niat dan konsistensi perilaku. Ketika masyarakat merasa bahwa perilaku ramah lingkungan menjadi norma sosial yang didukung oleh komunitas, maka peluang terbentuknya perilaku pro-lingkungan yang berkelanjutan menjadi lebih besar.

e. Pelatihan sebagai Proses Perubahan Perilaku yang Berkelanjutan

Perubahan perilaku pro-lingkungan melalui pelatihan pengelolaan sampah berbasis 5R perlu dipahami sebagai proses yang berkelanjutan. Perilaku baru akan lebih mudah dipertahankan apabila pelatihan diikuti dengan penguatan, pendampingan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pelatihan tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan awal, tetapi sebagai bagian dari proses pembelajaran sosial yang terus berkembang di masyarakat.

Wijayanti dan Santoso (2024) menyatakan bahwa edukasi lingkungan berbasis praktik yang dilakukan secara berkelanjutan mampu memperkuat internalisasi nilai-nilai lingkungan dan membentuk perilaku pro-lingkungan yang konsisten. Dalam konteks Desa Jatihurip, pelatihan 5R yang dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan berpotensi menjadi mekanisme utama dalam membangun kebiasaan pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab dan ramah lingkungan.

## **2.2. Kerangka Konseptual**

### **2.2.1. Pemahaman dan Perilaku Pro-Lingkungan Setelah Pelatihan Prinsip 5R (*Reduce, Reuse, Recycle, Replace, Replant*)**

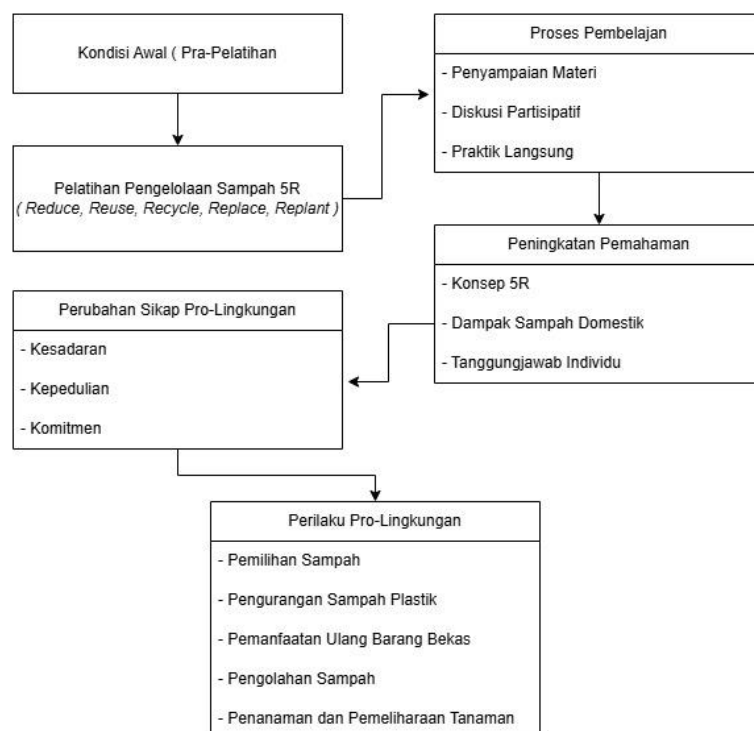
Perubahan perilaku pro-lingkungan masyarakat tidak terjadi secara instan, melainkan melalui suatu proses transformasi yang melibatkan aspek kognitif, afektif dan konatif. Dalam konteks pendidikan lingkungan, pelatihan berbasis prinsip 5R (*Reduce, Reuse, Recycle, Replace, Replant*) berfungsi sebagai stimulus edukatif yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan sampah domestik secara berkelanjutan.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa kondisi awal (pra-pelatihan) masyarakat masih menunjukkan keterbatasan dalam pemahaman dan praktik pengelolaan sampah domestik. Oleh karena itu, pelatihan 5R menjadi intervensi strategis untuk mendorong transformasi perilaku melalui proses pembelajaran partisipatif.

Proses pembelajaran dalam pelatihan meliputi penyampaian materi, diskusi partisipatif, dan praktik langsung. Melalui tahapan tersebut, masyarakat diharapkan mengalami peningkatan pemahaman mengenai konsep 5R, dampak sampah domestik terhadap lingkungan, serta tanggung jawab individu dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Peningkatan pemahaman (aspek kognitif) selanjutnya memengaruhi perubahan sikap pro-lingkungan (aspek afektif), yang ditandai dengan munculnya kesadaran ekologis, kepedulian terhadap lingkungan, dan komitmen untuk berperilaku lebih bertanggung jawab. Perubahan sikap ini menjadi tahapan mediasi menuju pembentukan perilaku pro-lingkungan (aspek konatif), seperti pemilahan sampah rumah tangga, pengurangan penggunaan plastik, pemanfaatan ulang barang bekas, pengolahan sampah, serta penanaman dan pemeliharaan tanaman.

Dengan demikian, kerangka konseptual rumusan masalah pertama menggambarkan alur transformasi perilaku masyarakat melalui intervensi pelatihan berbasis prinsip 5R, yang dimulai dari kondisi awal, proses pembelajaran, peningkatan pemahaman, perubahan sikap, hingga terbentuknya perilaku pro-lingkungan.



**Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konseptual I Pemahaman dan Perilaku Pro-Lingkungan Setelah Pelatihan**

*Sumber : Dokumentasi Peneliti ( 2026 )*

### **2.2.2. Karakteristik Pelatihan 5R yang Sesuai untuk Membentuk Perilaku Pro-Lingkungan**

Pembentukan perilaku pro-lingkungan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh materi yang disampaikan, tetapi juga oleh karakteristik dan desain pelatihan yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menganalisis dampak pelatihan, tetapi juga mengeksplorasi bentuk dan karakteristik pelatihan 5R yang sesuai dengan Desa Jatihurip.

Karakteristik pelatihan yang efektif dalam konteks pemberdayaan masyarakat umumnya bersifat partisipatif, kontekstual, berbasis komunitas, praktik langsung, dan berkelanjutan. Pendekatan partisipatif memungkinkan masyarakat terlibat aktif dalam proses pembelajaran, sementara pendekatan kontekstual memastikan materi yang disampaikan relevan dengan permasalahan pengelolaan sampah domestik di lingkungan setempat.

Karakteristik pelatihan tersebut mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui diskusi, simulasi, dan kerja kelompok. Keterlibatan ini menjadi prasyarat penting bagi proses internalisasi nilai-nilai 5R, yaitu terbentuknya kesadaran bersama dan tanggung jawab sosial terhadap pengelolaan lingkungan.

Internalisasi nilai yang kuat akan berkontribusi pada pembentukan perilaku pro-lingkungan yang lebih konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan proses tersebut, penelitian ini bertujuan merumuskan model pelatihan 5R yang kontekstual dan sesuai dengan karakteristik masyarakat Desa Jatihurip, sehingga mampu membentuk dan meningkatkan perilaku pro-lingkungan secara efektif.

Dengan demikian, kerangka konseptual rumusan masalah kedua menekankan pada hubungan antara desain pelatihan, keterlibatan masyarakat, internalisasi nilai, pembentukan perilaku, hingga ditemukan model pelatihan yang sesuai.



**Gambar 2.2 Bagan Kerangka Konseptual II Karakteristik Pelatihan 5R yang Sesuai untuk Membentuk Perilaku Pro-Lingkungan**

*Sumber : Dokumentasi Peneliti ( 2026 )*

### 2.3. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan merupakan penelitian yang hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang relevan berasal dari penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian. Berikut merupakan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

**Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan**

| No | Judul Penelitian                                                                            | Penulis               | Metode Penelitian                      | Temuan / Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Praktik Terbaik Pengelolaan Sampah di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul | Tim Peneliti (2023)   | Studi Kasus / Observasi                | Model pengelolaan sampah desa melalui BUMDes “Kupas” menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan partisipatif. Program ini menginspirasi penerapan pengelolaan sampah mandiri di tingkat desa.                           |
| 2  | Sedekah Sampah: Gerakan Baru Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Pulau Jawa, Indonesia | Hasanah et al. (2023) | Observasi Lapangan & Diskusi Kelompok  | Gerakan waste sadaqah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan nilai keagamaan. Warga lebih aktif memilah dan mengumpulkan sampah karena termotivasi oleh nilai sedekah dan keberkahan sosial. |
| 3  | Evaluasi Tata Kelola Program Pengurangan Sampah Berbasis                                    | Tim Peneliti (2023)   | Evaluasi Kebijakan / Studi Tata Kelola | Penelitian menilai efektivitas kebijakan CBSWM di Makassar. Hasilnya menunjukkan                                                                                                                                      |

| No | Judul Penelitian                                                                                    | Penulis                                                                                       | Metode Penelitian                            | Temuan / Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Komunitas di Kota Makassar                                                                          |                                                                                               |                                              | bahwa dukungan pemerintah lokal dan partisipasi warga berperan penting dalam keberhasilan pengurangan sampah rumah tangga.                                                                                                              |
| 4  | Pengelolaan Sampah yang Digagas Masyarakat: Hasil Uji Penelitian Tindakan di Yogyakarta, Indonesia  | Surahma Asti Mulasari, Adi Heru Husodo, Sulistyawati, Tri Wahyuni Sukei, Fatwa Tentama (2024) | Penelitian Tindakan (Action Research)        | Program pengelolaan sampah berbasis masyarakat (CBWM) berhasil meningkatkan kesadaran pemilahan sampah, inovasi daur ulang, dan kolaborasi warga. Peningkatan partisipasi masyarakat memperkuat kesehatan dan kesejahteraan lingkungan. |
| 5  | Implementasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat untuk Meningkatkan Kesehatan Lingkungan di Desa | Utami, Titis Istiqomah, & Lieza Corsita (2024)                                                | Kuantitatif Analitik (Cross-Sectional Study) | Ditemukan 54,1 % warga belum terlibat dalam pengelolaan sampah. Pendidikan dan sarana infrastruktur sangat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.                                                                 |

| No | Judul Penelitian                                                                                         | Penulis                                             | Metode Penelitian                               | Temuan / Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat untuk Keberlanjutan Lingkungan Desa di Kawasan Perkotaan Semarang | Tim Peneliti (2024)                                 | Kualitatif Deskriptif                           | Pengelolaan sampah komunitas di Desa Mayangsari meningkatkan kualitas lingkungan dan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan pengorganisasian lokal. Kolaborasi warga menjadi kunci keberhasilan program.        |
| 7  | Perilaku Rumah Tangga Perkotaan di Indonesia: Faktor-Faktor yang Mendorong Partisipasi Nol Sampah        | Faizal Amir, Alimuddin S. Miru, & Edy Sabara (2025) | Survei Kuantitatif (1.200 responden di 12 kota) | Faktor <i>perceived behavioral control</i> (keyakinan akan kemampuan mengelola sampah) merupakan prediktor paling kuat dari partisipasi <i>zero waste</i> , diikuti oleh norma sosial dan pengetahuan lingkungan. |

## 2.4. Pertanyaan Penelitian

### 2.4.1. Pemahaman dan Perilaku Pro-Lingkungan Setelah Pelatihan Prinsip 5R (*Reduce, Reuse, Recycle, Replace, Replant*)

- Bagaimana pola pengelolaan sampah domestik masyarakat sebelum pelatihan 5R dan bagaimana karakteristik perilaku tersebut?
- Bagaimana proses transformasi pemahaman masyarakat terhadap prinsip 5R setelah mengikuti pelatihan?
- Bagaimana dinamika perubahan perilaku pro-lingkungan yang terjadi pasca pelatihan?
- Faktor sosial, kultural, dan struktural apa yang mempengaruhi keberlanjutan perubahan perilaku tersebut?

#### **2.4.2. Karakteristik Pelatihan 5R yang Sesuai untuk Membentuk Perilaku Pro-Lingkungan**

- a. Bagaimana desain pelatihan 5R diterapkan dalam konteks sosial masyarakat Desa Jatihurip?
- b. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses pelatihan mempengaruhi internalisasi nilai-nilai 5R?
- c. Karakteristik pelatihan seperti apa yang paling efektif dalam membentuk perilaku pro-lingkungan?
- d. Bagaimana model pelatihan 5R yang kontekstual dan berkelanjutan dapat dirumuskan berdasarkan temuan lapangan?
- e. Karakteristik pelatihan apa yang paling sesuai dengan kondisi desa?